

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Propinsi Jambi merupakan salah satu kawasan di Sumatera yang mempunyai nilai strategis di sektor kehutanan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) memudahkan para pemilik modal untuk masuk ke Jambi.¹ Kebijakan pada masa Pemerintahan Orde Baru telah melahirkan para pemodal besar untuk bebas merambah dan menghancurkan hutan yang ada di pedalaman Propinsi Jambi. Keadaan tersebut juga semakin diperparah dengan masuknya perusahaan besar milik swasta maupun pribadi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Pembukaan perkebunan kelapa sawit yang banyak terjadi pada masa Orde Baru ternyata menyimpan banyak masalah, antara lain masalah penggunaan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat, proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan konflik sosial. Menurut catatan akhir tahun 2013 di Propinsi Jambi terdapat 21 kasus konflik sosial yang dialami oleh masyarakat adat termasuk Suku Anak Dalam² dan 12 kasus konflik

¹ Lindayanti dan Zaiyardam Zubir. "Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Plural: Jambi 1970-2012". *Prosiding Seminar Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. 2015, hal. 21.

² Pada penulisan tesis ini akan digunakan istilah SAD, yang merupakan istilah singkatan dari Suku Anak Dalam. SAD merupakan penamaan yang dilabelkan oleh Pemerintah Indonesia setelah

sosial antara petani dan perusahaan.³ Masalah ini sama seperti yang terjadi di Kabupaten Batang Hari yang kawasannya banyak dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, termasuk sebagian kawasan yang menjadi hunian masyarakat SAD.

SAD⁴ kelompok Batin 9⁵ misalnya, mengklaim bahwa kawasan hidup yang diakui sebagai tempat tinggal mereka telah diserobot perusahaan perkebunan sawit milik swasta yakni PT. Asiatic Persada, padahal masyarakat SAD jauh lebih dulu berada dan menghuni di sekitar kawasan perkebunan sawit yang telah disulap menjadi sebuah perusahaan besar tersebut.⁶ Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah populasi SAD yang cukup besar, menurut data statistik Kabupaten Batang Hari tahun 2010, masyarakat SAD berjumlah sebanyak 864 Kepala Keluarga (KK), dengan total keseluruhan yakni sebanyak 3.895 Jiwa.⁷ Masyarakat SAD tersebar di 8 Kecamatan yang berada di peta wilayah administratif Kabupaten Batang Hari.

kemerdekaan terhadap penduduk minoritas yang hidup di kawasan pedalaman hutan Propinsi Jambi, dan hidup secara tradisional dengan memanfaatkan hasil hutan.

³ “Catatan Akhir Tahun 2013, Perkebunan Sawit Hendak Kemana?”, *Bulletin Tandan Sawit*. /edisi Desember 2013, hal. 20.

⁴ Beberapa literatur yang menunjukkan penamaan tentang Orang Rimba maupun Orang Kubu adalah istilah yang sama ditujukan kepada masyarakat SAD.

⁵ Berdasarkan penuturan lisan yang bersifat turun temurun. Batin 9 merupakan istilah penamaan kelompok SAD yang pernah berkuasa di sembilan aliran sungai kecil di Kabupaten Batang Hari. Wilayah kekuasaan SAD dikenal dengan nama “Sembilan Batin”, dengan mengikuti penamaan sungai yakni: Batin Singoan di Sungai Singoan, Batin Bulian di Sungai Bulian, Batin Bahar di Sungai Bahar, Batin Jebak di Sungai Jebak, Batin Jangga di Sungai Jangga, Batin Pemusiran di Sungai Pemusiran, Batin Burung Antu di Sungai Burung Antu, Batin Selisak di Sungai Selisak dan Batin Sekamis di Sungai Sekamis.

⁶ “Lapangan Kantor Gubernur Akan ditanami Singkong” *Tribun Jambi*/edisi Kamis 19 Desember 2013.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari, *Batang Hari Dalam Angka 2010*. (Muara Bulian: BPS Kabupaten Batang Hari, 2010), hal. 182.

SAD secara umum hidup dengan mengandalkan hasil hutan, pada tahun 2000, luas hutan di Propinsi Jambi hanya tinggal berkisar 1,6 juta hektar, dari jumlah total luas keseluruhan pada tahun 1990 yakni 2,4 juta hektar.⁸ Artinya laju kerusakan hutan di Propinsi Jambi yang terjadi sejak tahun 1970an hingga tahun 2000 semakin meningkat. Kerusakan hutan akibat penebangan dalam bentuk Hak Penguasaan Hutan (HPH), dan akibat penanaman perkebunan kelapa sawit dengan skala besar di Kabupaten Batang Hari mengharuskan masyarakat SAD tersingkir dari wilayah jelajah asalnya.

Hingga awal 2015 nasib SAD seakan tidak pernah lepas dari kesengsaraan. Fenomena kematian 11 orang SAD merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah selama ini telah abai terhadap kelangsungan hidup mereka. Terkait hal tersebut Pemerintah selama ini berdalil bahwa SAD yang meninggal tersebut diduga tidak mendapatkan asupan pangan dan air bersih yang layak sehingga mereka sakit dan akhirnya meninggal dunia.⁹ Kematian beruntun menyerang di dua Kabupaten yang menjadi daerah persebaran masyarakat SAD yaitu: Kabupaten Batang Hari dan Sarolangun. Korban tersebut merupakan SAD yang berasal dari tiga kelompok *Tumenggung* antara lain: kelompok *Tumenggung Marituha*, *Tumenggung Ngamal* dan *Tumenggung Nyenong*.¹⁰ Kebijakan yang pernah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1970an ternyata tidak mampu mengentaskan masalah yang

⁸ Muhammad Ibrahim, "Kehidupan Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun", *Tesis*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hal. 1.

⁹ Jambi Independen. Edisi Jum'at, 13 Maret 2015, hlm. 17.

¹⁰ <http://jambiupdate.com/artikel-menteri-sosial-khofifah-indar-parawansa-akan-kunjungi-sad-di-jambi---.html>. Rabu, 11 Maret 2015.

dialami oleh SAD. Lantas, mengapa Pemerintah merasa perlu membentuk kebijakan bagi SAD.

Salah satu kebijakan yang diperuntukkan bagi SAD dinamakan dengan istilah PKSMT atau Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing. Tujuan Pemerintah mengambil kebijakan tersebut dilandasi anggapan dasar bahwa SAD telah kehilangan kontak dengan arus perubahan umum (*mainstream*) dari sisi sosial, religi, politik dan ekonomi. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk terus melakukan berbagai model pembinaan terhadap masyarakat SAD dengan cara memasukkan ke dalam tatanan masyarakat umum, melalui pemberian bantuan rumah atau pemukiman, mengenalkan cara-cara berproduksi, mengenalkan budaya baru, pendidikan formal, fasilitas kesehatan, pemberian agama, dan mengajarkan untuk berinteraksi dengan masyarakat lain.¹¹

Hasil akhir dari model pembinaan yang dijalankan tersebut, diharapkan mampu merubah tatanan kondisi sosial masyarakat SAD yang dianggap primitif oleh Pemerintah Orde Baru yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dijuluki sebagai *Bapak Pembangunan*.¹² Selain kebijakan di sektor kehutanan, perkebunan skala besar, dan PKSMT, kebijakan transmigrasi secara besar-besaran juga

¹¹ Dodi Rokhian, "Bentuk Perlawanan Orang Rimba Makekal Hulu Terhadap Kebijakan Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi", *Tesis*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hal. 4.

¹² Anggapan makna primitif yang dilabelkan oleh Pemerintah rezim Orde Baru dengan istilah "Masyarakat Terasing" adalah mereka masyarakat yang hidupnya masih terpencar-pencar, jauh dari perkembangan, jauh dari pemukiman penduduk, tidak mengenyam bangku pendidikan dan dianggap tidak berpakaian sebagaimana masyarakat pada umumnya, sehingga Pemerintah Orde Baru merasa perlu untuk memberadabkan mereka, sebagai citra menuju Negara modern yang nantinya akan diproyeksikan ke dunia luar. Prioritas pembangunan juga diarahkan untuk mengikis citra-citra keprimitifan tersebut. Dodi Rokhian, "Bentuk Perlawanan Orang Rimba Makekal Hulu Terhadap Kebijakan Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi",.. hal. 4.

diberlakukan oleh Pemerintahan Orde Baru. Pada periode 1980an, Pemerintah memindahkan penduduk Jawa ke seluruh wilayah Kabupaten Batang Hari, dengan dukungan dana dari Bank Dunia (*World Bank*) demi pertumbuhan ekonomi yang dikenal sentralistis.¹³

Program PKSMT dan transmigrasi pada dasarnya merupakan kepentingan Pemerintah untuk merubah kondisi sosial SAD baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tentunya kepentingan tersebut telah terjalin antara penguasa dan pengusaha untuk merampas bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan SAD yaitu hutan.

Pada era 1990an. Pemerintah mengklaim bahwa telah berhasil membina masyarakat SAD di Kabupaten Batang Hari dalam berbagai model yang telah direncanakan dan ditentukan. Jumlah SAD yang telah dibina dan dimukimkan mencapai angka yang sangat fantastis yaitu sebanyak 2.744 KK atau 12.185 Jiwa.¹⁴ SAD yang telah terbina tersebut dikenalkan dan diajarkan cara-cara bertani, dengan harapan kedepan dapat menjadi seorang petani handal, dan diharapkan dapat mendukung program pembangunan nasional yang telah direncanakan Pemerintah Orde Baru.

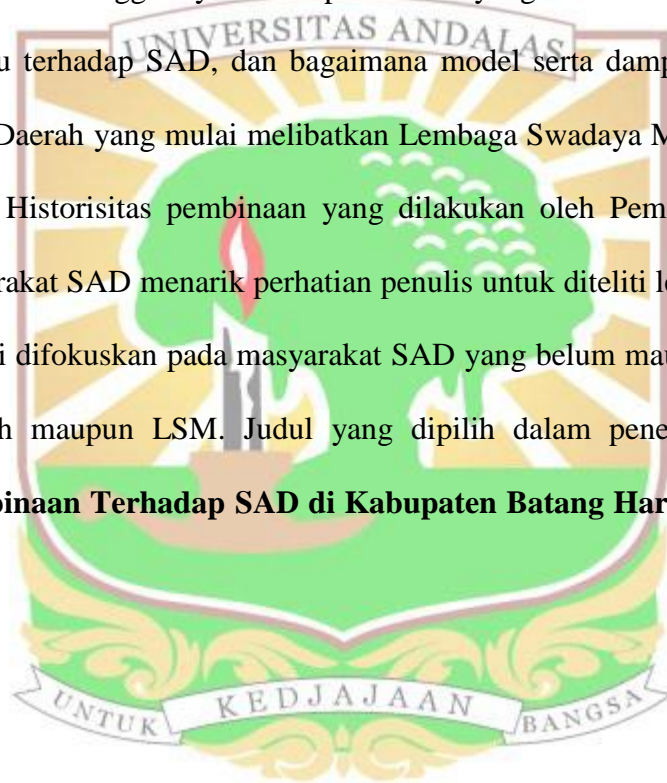
Program pembinaan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru terhadap SAD menarik perhatian penulis untuk diteliti lebih lanjut. Indikator

¹³ “Bioregion Kawasan Hidup Orang Rimba”. *Bulletin Alam Sumatera*/edisi Agustus 2008. hal. 21.

¹⁴ “Pembinaan Suku Kubu di Jambi difokuskan pada Sektor Pertanian”, *Sumatera Ekspres*/edisi Jum’at, 9 Mei 1997.

keberhasilan yang tunjukkan oleh Pemerintah tidak cukup hanya sampai pada tingkat memukimkan SAD saja, melihat di beberapa daerah seperti di TNBD¹⁵ masyarakat SAD di sekitar lokasi tersebut selalu gagal untuk dimukimkan dan dibina, hal tersebut disebabkan keterikatan SAD untuk selalu mempertahankan tradisi dan budaya yang dianggap sebagai warisan nenek moyang mereka.¹⁶

Bagaimana sesungguhnya model pembinaan yang dilakukan Pemerintah pada masa Orde Baru terhadap SAD, dan bagaimana model serta dampak pembinaan di masa Otonomi Daerah yang mulai melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap SAD. Historisitas pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan LSM terhadap masyarakat SAD menarik perhatian penulis untuk diteliti lebih lanjut. Untuk itu penelitian ini difokuskan pada masyarakat SAD yang belum maupun telah terbina oleh Pemerintah maupun LSM. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah: **“Sejarah Pembinaan Terhadap SAD di Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi 1970-2014”**.



¹⁵ TNBD merupakan istilah singkatan dari Taman Nasional Bukit Duabelas. Pada tahun 2000. Kawasan TNBD oleh Pemerintah Propinsi Jambi secara resmi dijadikan sebagai tempat atau populasi hunian SAD. Dua Kecamatan di Kabupaten Batang Hari yaitu Kecamatan Maro Sebo Ulu dan Batin XXIV, termasuk ke dalam kawasan TNBD.

¹⁶ “Program Memukimkan Orang Rimba Gagal”. *Sriwijaya Post*/edisi Sabtu, 3 April 1999.

1.2. Perumusan Masalah dan Batasan

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian antara lain yaitu:

1. Bagaimana model pembinaan SAD pada masa Orde Baru dan Masa Otonomi Daerah?
2. Apa repon masyarakat SAD dari pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan selama ini?
3. Mengapa Pemerintah perlu melakukan kebijakan terhadap SAD?

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi batasan temporal dan batasan spasial. Untuk batasan temporal diambil periode tahun 1970-2014. Tahun 1970 sebagai batasan awal penelitian, Program PKSMT yang berganti nama menjadi pemberdayaan KAT di Indonesia mulai dapat ditelusuri pada tahun tersebut. Program PKSMT erat kaitannya dengan wilayah yang menjadi populasi kehidupan masyarakat SAD. Tahun 2014 sebagai batasan akhir penelitian, pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan LSM terhadap SAD di beberapa Desa yang ada di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2014 ini mulai terhenti, dan menandakan beberapa klaim atas keberhasilan Pemerintah dan LSM dalam memukimkan SAD, dan klaim keberhasilan dalam mengatasi masalah sengketa lahan yang terjadi pada masyarakat SAD.

SAD yang berada di Kabupaten Batang Hari merupakan fokus sasaran utama dalam penelitian ini. Khususnya di Desa Bungku Kecamatan Bajubang yang merupakan Desa terluas di Kabupaten Batang Hari dan mewakili sebagian besar SAD

di Kecamatan Bajubang.¹⁷ SAD di Kabupaten Batang Hari umumnya merupakan SAD yang telah hidup modern, walaupun secara antropologis awal mulanya mereka merupakan SAD yang dikategorikan setengah kelana. Program pembinaan terhadap SAD di lokasi ini tentunya mendapatkan berbagai respon dari kalangan masyarakat SAD baik berupa penerimaan maupun penolakan dalam setiap implementasi kebijakannya.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penelitian ini pada prinsipnya ingin menjelaskan beberapa aspek antara lain:

1. Mendeskripsikan model pembinaan SAD pada masa Orde Baru dan Masa Otonomi Daerah.
2. Menjelaskan berbagai repon masyarakat SAD dari pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan selama ini.
3. Untuk mengetahui alasan Pemerintah melakukan kebijakan terhadap SAD.

Manfaat dari penelitian tesis ini antara lain sebagai bahan pembandingan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dan diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat menambah literatur yang berhubungan dengan ilmu sejarah. Sehingga nantinya dapat dijadikan bahan analisis maupun tambahan dalam rangka penelitian yang mendalam. Semoga penelitian ini nantinya memiliki tindak lanjut di kemudian hari untuk jenjang yang lebih tinggi bagi peneliti. Manfaat lain dari penulisan tesis ini

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari, *Batang Hari Dalam Angka 2010...*, hal. 7.

sebagai bahan pertimbangan dan masukan terhadap Pemerintah Daerah dalam mengambil setiap langkah kebijakan yang berhubungan dengan masalah SAD.

1.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pembinaan SAD menelusuri berbagai sumber dan literatur yang telah ada sebelumnya. Adapun karya-karya yang relevan membahas dan menyinggung penelitian ini banyak dijumpai antara lain yaitu:

Lindayanti dan Zaiyardam Zubir dalam bukunya *Menuju Integrasi Nasional Pergolakan Masyarakat Plural dalam Membentuk Indonesianisasi*. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa SAD dibedakan menurut dua kategori, yaitu SAD yang masih liar (belum menetap) dan SAD yang sudah bertempat tinggal (menetap). Dalam buku tersebut terdapat kemiripan tentang ragam asal usul SAD.¹⁸ Namun dalam penelitian tersebut menjelaskan asal usul SAD di Propinsi Jambi secara garis besar saja dan tidak menjelaskan secara rinci tentang ragam asal usul SAD yang terdapat di Kabupaten Batang Hari.

Muhammad Ibrahim dalam tesisnya yang berjudul “Kehidupan SAD di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun”. Dalam kajian tesis tersebut menjelaskan bahwa SAD merupakan merupakan salah satu masyarakat yang mengantungkan hidupnya terhadap sumber daya alam yang ada di hutan.¹⁹ Tesis

¹⁸ Lindayanti dan Zaiyardam Zubir, *Menuju Integrasi Nasional Pergolakan Masyarakat Plural dalam Membentuk Indonesianisasi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013).

¹⁹ Muhammad Ibrahim. “Kehidupan Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun”, *Tesis*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013).

karya Muhammad Ibrahim lebih menitikberatkan penelitiannya terhadap masyarakat SAD yang berada di Kabupaten Sarolangun yang lebih dikenal dengan SAD kelompok Rimba. Sedangkan SAD di Kabupaten Batang Hari terdapat dua kelompok yang berbeda namun memiliki kemiripan dalam status sosialnya yakni sama-sama hidup secara tradisional. Kelompok SAD di Kabupaten Batang Hari dalam penelitian ini antara lain yakni kelompok Batin 9 dan Kelompok Rimba, yang tentunya sangat jauh berbeda kajian dan fokus utamanya dengan karya tesis Muhammad Ibrahim.

Dodi Rokhdian dalam tesisnya yang berjudul “Bentuk Perlawanan Orang Rimba Makekal Hulu Terhadap Kebijakan Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi”. menjelaskan tentang proyek konservasi hutan yang dilakukan di TNBD terhadap SAD kelompok Rimba.²⁰ Dodi Rokhdian juga menyinggung tentang pola hidup SAD melalui studi antropologi dari salah satu kelompok SAD yang berada di Kabupaten Sarolangun yakni SAD kelompok Rimba. Penelitian tesis Dodi Rokhdian tentunya sangat berbeda dengan penelitian tesis ini yang lebih mengarah kepada masyarakat SAD kelompok Batin 9 di Kabupaten Batang Hari.

Vivi Yulaswati dkk dalam Judul Bukunya *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif* menjelaskan bahwa masyarakat SAD di Kabupaten Batang Hari awal mulanya merupakan masyarakat yang hidup secara nomaden. Penelitian yang dilakukan Vivi Yulaswati hanya mencakup satu desa yang menjadi kajian utama yakni di Desa Singkawang yang merupakan salah satu Desa di

²⁰ Dodi Rokhdian. “Alim Rajo Disembah, Piado Rajo Disanggah. Bentuk Perlawanan Orang Rimba Makekal Hulu Terhadap Kebijakan Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi”.*Tesis*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012),

Kabupaten Batang Hari. Dalam penelitian Vivi Yulaswati menerangkan beberapa perumahan permanen yang merupakan bantuan Kementerian Sosial RI.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Yulaswati dapat dipergunakan sebagai bahan tambahan dalam penulisan tesis ini. Namun penelitian Vivi Yulaswati dkk tidak menjelaskan kelompok SAD mana yang dimaksud dalam tulisan tersebut. Penelitian tesis ini akan mencoba memisahkan beberapa kelompok SAD yang terdapat di Kabupaten Batang Hari agar lebih terperinci.

Siti Fatimah dalam laporannya penelitiannya yang berjudul “Transmigrasi Sebagai Alternatif Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil SAD di Provinsi Jambi”. Dalam laporan penelitian Siti Fatimah, komunitas SAD di Propinsi Jambi tersebar di wilayah Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, dan Merangin. Di samping itu ada juga yang mendiami kawasan TNBD tepatnya di sekitar Sungai Serenggam, Sungai Terap, Sungai Kejasung, Sungai Makekal dan Sungai Sakalado. Laporan penelitian Siti Fatimah lebih tentang SAD secara garis besar di Propinsi Jambi dapat dijadikan acuan untuk dikembangkan lebih lanjut agar tidak terjadi plagiarisme fokus kajian terhadap penulisan tesis ini meskipun metode dan pendekatan yang digunakan sama yakni sosial-budaya.

Budi Setiawan dalam tesisnya “Kebijakan Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas Propinsi Jambi”.

²¹ Vivi Yulaswati dkk. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. (Jakarta: Bappenas, 2013).

menjelaskan beberapa penyebab utama kegagalan SAD dalam rangka pembangunan yang lebih disebabkan oleh faktor struktural.²² Metode yang digunakan dalam penelitian budi setiawan berupa observasi lapangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagian besar tulisan membahas tentang asal usul SAD secara umum dan mengarah pada pola kehidupan, tradisi serta budaya yang masih melekat pada masyarakat SAD. Hal ini terlihat dari tulisan Lindayanti, Vivi Yulaswati Dkk, penelitian Muhammad Ibrahim, penelitian Dodi Rokhdian, laporan penelitian Siti Fatimah dan penelitian tesis Budi Setiawan. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sangat relevan dengan kajian tesis ini, diharapkan dengan adanya kajian dari penelitian terdahulu tersebut dapat membantu penulis dalam rangka mengembangkan penelitian tesis ini.

Dari banyaknya studi literatur yang telah ditelusuri oleh penulis, ada perbedaan kajian mendalam yang mungkin belum pernah dibahas oleh para penelitian terdahulu. Dalam penelitian tesis ini penulis ingin mencoba mengungkapkan lebih rinci berbagai bentuk dan proses pembinaan yang pernah dilakukan oleh Pemerintahan pada masa Orde Baru hingga masa Otonomi Daerah, serta dampak dan perubahan apa yang terjadi pada masyarakat SAD. Berdasarkan waktu, tempat dan sudut pandang yang berbeda. Sejauh pemahaman penulis belum ada penelitian yang menuliskan tentang pembinaan SAD di Kabupaten Batang Hari secara khusus dan mendalam.

²² Budi Setiawan. "Kebijakan Pembangunan Sosial Masyarakat Adat Orang Rimba di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi". *Tesis*. (Jakarta: Universitas Indonesia. 2010).

1.5. Kerangka Teoritis dan Pendekatan

Untuk melihat perkembangan pembinaan di Kabupaten Batang Hari, maka terlebih dahulu kita tilik pengertian pembinaan secara umum. Pembinaan mencakup dua pengertian, yang *pertama* pembinaan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan, guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian *kedua*, pembinaan merupakan hal umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.²³

Fungsi pokok pembinaan terbagi menjadi tiga yaitu, penyampaian informasi dan pengetahuan, perubahan dan pengembangan sikap, latihan dan pengembangan sikap. Sasaran didalam suatu pembinaan haruslah dirumuskan dengan jelas dan tegas, sasaran pembinaan harus ada hubungannya dengan minat dan kebutuhan dari para peserta.²⁴

Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing (PSKMT) merupakan program yang dibentuk oleh Pemerintah Orde Baru, ketika Soeharto menjabat sebagai Presiden RI. Program PKSMT bertujuan untuk membina atau memberdayakan masyarakat SAD dalam segala aspek kehidupan agar dapat berperan aktif dalam

²³ Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta : Kanisius, 1986), hal. 14.

²⁴ *Ibid...*, hal. 16.

pembangunan, tanpa harus melihat kondisi sosial budaya dan lingkungan”.²⁵ Dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 60/HUK/1998 disebutkan bahwa pengertian masyarakat terasing²⁶ adalah kelompok orang yang hidup dalam kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik nasional.²⁷

Masyarakat terasing pada masa Orde Baru dicirikan sebagai berikut:

1. Berbentuk komunitas kecil
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan
3. Pada umumnya terpencil secara geografi dan sulit dijangkau
4. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem
5. Peralatan dan teknologi sederhana
6. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi
7. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.²⁸

Pada tahun 1999, sesuai dengan tuntutan Otonomi Daerah. Istilah masyarakat terasing yang ditujukan bagi masyarakat SAD, kemudian diganti menjadi Komunitas Adat Terpencil (KAT).²⁹ KAT merupakan salah satu program lanjutan yang dicanangkan Pemerintah pada masa Otonomi Daerah yang sebenarnya memiliki kesamaan tujuan dalam menangani masalah SAD yang dicirikan memiliki hidup

²⁵ Direktorat Bina Masyarakat Terasing. *Pengkajian Budaya dan Lingkungan Masyarakat Terasing Propinsi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur*. (Jakarta: Departemen Sosial RI: 1999/2000), hlm.3

²⁶ Masyarakat terasing adalah istilah nama yang dilabelkan oleh Pemerintah Orde Baru kepada sekelompok komunitas yang secara hidupnya terasing, terpencil dan jauh dari perkembangan dan kemajuan, untuk di Propinsi Jambi masyarakat terasing tersebut lebih dikenal dengan istilah SAD. SAD memiliki kriteria umum yang dikategorikan oleh Pemerintah sebagai masyarakat yang berbentuk komunitas kecil.

²⁷ Prasinta Dewi. *Permasalahan dan Prospek Penelitian Masyarakat Terasing*. (Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing Departemen Sosial RI. 1999/2000), hal:21

²⁸ *Ibid.* hal, 21.

²⁹ Fachrudin Saudagar. “Masalah disekitar Suku Anak Dalam (SAD)”, *Bahan Rapat Kordinasi Kelompok Kerja KAT*. 2011. Jambi, hal. 4.

terasingan, terisolir dan berada di daerah pedalaman. Ditinjau dari perspektif Antropologi, komunitas-komunitas sosial yang dikategorikan ke dalam KAT dibedakan atas beberapa tipe komunitas sosial berdasarkan aspek sosial, budaya dan ekonominya, yaitu komunitas sosial berburu dan meramu (*hunting and gathering community*), komunitas sosial berladang pindah (*shifting cultivation*), dan komunitas sosial pedesaan.³⁰

Pembinaan hampir tidak dapat dilepaskan dari konsep pemberdayaan, sehingga terkadang terdapat tumpang tindih antara pemahaman konsep pembinaan dan pemberdayaan. Namun dalam implementasinya kedua konsep tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu sama-sama ingin mewujudkan masyarakat SAD ke dalam suatu masyarakat yang hidup normal dan bergaya ala modern. Pemberdayaan di dalam pengertian KAT adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat KAT setempat.³¹

SAD adalah salah satu kelompok masyarakat minoritas yang hidup di pedalaman Propinsi Jambi. SAD sering juga disebut sebagai Orang Kubu. Istilah Orang Kubu pertama kali disebutkan oleh Van Dongen pada tahun 1906, untuk menyebut orang-orang primitif yang ditemuinya di daerah perbatasan pedalaman Jambi. Van Dogen menyebutnya sebagai Kubu Ridan, atau Orang Kubu yang ada di

³⁰ Deddy Koespramoedyo dkk, *Kajian Perbandingan Program pemberdayaan Komunitas adat terpencil Dan program Pengembangan wilayah Terpadu*. (Jakarta: Bappenas, 2004), hal. 9.

³¹ Lihat pula: Salinan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2012. Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Pasal 1. Poin ke 4, hal. 4.

Sungai Ridan di daerah Palembang dan Kubu Bulian yang berada di Kabupaten Batang Hari. Nama istilah Kubu ini akhirnya terlanjur melekat pada masyarakat yang hidup di pedalaman hutan Jambi.³² Istilah Kubu adalah penamaan yang tidak disukai oleh SAD,³³ karena istilah Kubu tidak disesuaikan dengan pendapat mereka, dan dipandang menghina bagi komunitas mereka yang hidup dan tersebar di kawasan hutan rimba Propinsi Jambi. SAD tidak menyebut dirinya Kubu, tapi mereka menyebut dirinya sebagai Orang Dalam, SAD atau Orang Rimba.³⁴

Setelah kemerdekaan penamaan Kubu diganti menjadi SAD. Sebagai bentuk penghormatan Pemerintah terhadap kelompok minoritas yang umumnya hidup di pedalaman hutan Jambi. Sedangkan penamaan Orang Rimba adalah penamaan yang dipakai oleh kelompok SAD yang hidup di kawasan hutan Rimba TNBD, pada masa Pemerintahan Orde Baru. SAD digolongkan oleh Depsos sebagai masyarakat terasing, melalui kebijakan PKSMT.³⁵ Kemudian pada tahun 2000 penamaan masyarakat terasing tidak lagi dipakai oleh Pemerintah RI. Istilah tersebut kemudian diganti dengan nama warga binaan KAT SAD. Perubahan nama-nama yang dilekatkan bagi SAD menurut hemat penulis merupakan cara bagi Pemerintah untuk

³² Van Dongen. "Orang Kubu di Onderafdeling Palembang", (*Bijdragen tot de Taal,-Land-en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie*, 1910), hal. 34.

³³ Dalam tesis ini menggunakan istilah penamaan SAD, yang telah disesuaikan dengan penamaan yang lebih disukai oleh kelompok tersebut, penamaan Orang Rimba juga di sebut sebagai SAD, sebagai bentuk keseluruhan dari masyarakat yang hidup dengan bergantung kepada hutan. Walaupun di beberapa daerah seperti di TNBT menyebut dirinya sebagai Orang Rimba, namun Orang Rimba itu sendiri lebih menerima dengan sebutan SAD dari pada istilah Kubu.

³⁴ Fachruddin Saudagar. *Upacara Besale Pengobatan Ritual Magis Suku Anak Dalam*, (Jambi: Yayasan FORKKAT, 2007), hal.3.

³⁵ Direktorat Bina Masyarakat Terasing. *Pengkajian Calon Lokasi Pembinaan Masyarakat Terasing*. (Jakarta: Departemen Sosial RI. 1999), hal. 19.

memodernisasikan kelompok tersebut dalam bahasa yang lebih modern demi menghilangkan asumsi negatif dimata dunia luar sebagai Negara tertinggal yang sedang melakukan tahap pembangunan.

Pada tahun 1967 dikenal sebagai masa-masa awal Orde Baru. Cita-cita Pemerintah Orde Baru untuk memajukan Negara dari ketertinggalan, adalah dengan memperkuat diri pada sektor ekonomi dan pembangunan, untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan yang cepat dalam tempo yang singkat. Pemerintah mulai membuka pintu peluang bagi para investor, investasi besar mulai berdatangan ke Indonesia, baik yang datang dari dalam maupun dari luar Negeri, teknologi serta keterampilan sumber daya manusia yang tinggi juga dituntut pada masa pembangunan. Kebijakan dalam bentuk HPH, Transmigrasi dan PKSMT yang berlaku di Kabupaten Batang Hari merupakan suatu usaha Pemerintah untuk mendukung dan menguatkan diri di sektor ekonomi selama Pemerintah Orde Baru berkuasa. Selain kebijakan HPH, transmigrasi dan PKSMT. Pemerintah Orde Baru juga berupaya mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang secara hidupnya terpisah akibat dari keterikatan adat istiadat dan sistem budaya tradisional, ke dalam tatanan masyarakat Desa, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.³⁶

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir dan merupakan proses perubahan sosial dan rekayasa sosial dari model pembangunan

³⁶ Mubyarto Dkk, "Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri". *Laporan Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1990, hal.73.

yang terjadi secara besar-besaran di Negara Dunia Ketiga. Ada banyak konsep tentang pembangunan. Misalnya menyamakan pembangunan dengan modernisasi. Dengan demikian, pembangunan adalah beralihnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, adanya rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.³⁷ Pembangunan berkisar pada bagaimana mengubah suatu masyarakat dengan mengubah sistem ekonominya. Pendukung teori pembangunan disebut developmentalis yang lazim berpegang pada ekonomi klasik. Teori pembangunan dari Rostow yang dipakai sebagai kebijakan ekonomi Indonesia selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru juga berasal dari developmentalis.³⁸

Untuk melakukan analisa terhadap upaya pembinaan yang dilakukan Pemerintah terhadap SAD di Kabupaten Batang Hari jika dilihat dari perspektif Pemerintahan Orde Baru sebagai suatu sistem memiliki tujuan yang jelas, jelas dalam konteks tujuan Pemerintah itu sendiri selaku perumus kebijakan. Pembangunan tersebut merupakan upaya untuk melakukan perubahan pada berbagai aspek kehidupan agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Semua paradigma maupun teori pembangunan bertujuan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam perjalanannya sering kali bertolak belakang dengan tujuan semula dan terkadang tidak tepat sasaran didalam aplikasinya. Untuk melakukan analisa ini akan digunakan teori pembangunan yang memandang bahwa untuk mencapai kemajuan ekonomi di berbagai bidang dibutuhkan suatu proses pembinaan terhadap lembaga-

³⁷ Rochajat Harun dan Elvinaro Ardianto. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Perspektif Dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 42.

³⁸ *Ibid.*, hal. 43.

lembaga maupun masyarakat yang berada dalam suatu Negara. Pembinaan bagi suatu Negara-negara yang baru berkembang adalah suatu proses pengintegrasian suku, agama dan kelompok sosial lain yang dianggap terasing ke dalam suatu masyarakat yang lebih modern yang berada dibawah suatu kekuasaan Negara.³⁹ Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu proses perubahan sosial yang diharapkan oleh aktor pembangunan terhadap kelompok tradisional agar dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri. Secara langsung maupun tidak langsung proses pembangunan merupakan cara Pemerintah untuk menghilangkan identitas budaya suatu etnis yang dianggap tertinggal, untuk menuju Negara yang lebih modern,

Selain itu, upaya pembinaan merupakan suatu usaha untuk memodernisasi masyarakat tradisional yang dianggap sebagai penghambat dalam proses pembangunan. Teori pembangunan lahir dari keprihatinan terhadap Negara yang disebut terbelakang, dengan asumsi bahwa keadaan masyarakat tersebut tidak memuaskan dan harus diubah dari cara fikir tradisional menuju cara fikir yang lebih modern baik secara sosial, ekonomi dan budaya agar lebih aktif dan dapat berperan serta dalam pembangunan yang umum digunakan bagi suatu Negara yang telah dianggap maju seperti Eropa.⁴⁰ Dalam penelitian ini terdapat dua konsep pembinaan yaitu pembinaan yang dilakukan Pemerintah untuk memodernisasikan SAD, dan

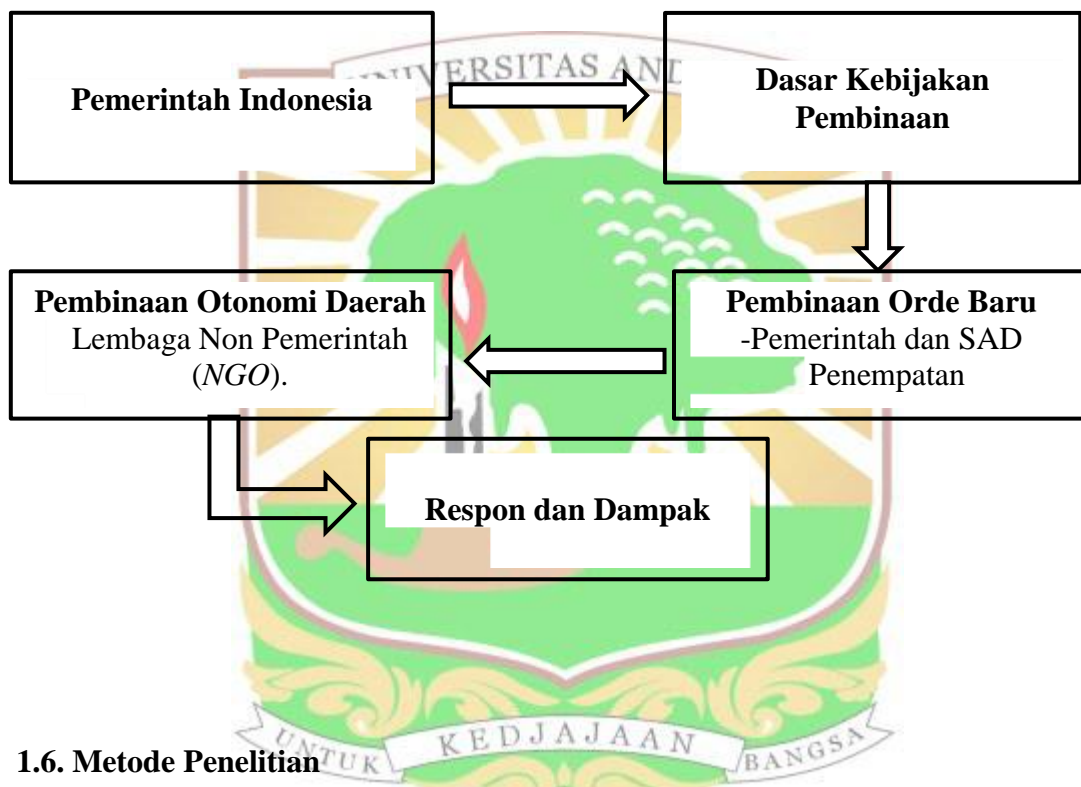
³⁹ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 24.

⁴⁰ Björn Hettne. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 5.

pembinaan yang dilakukan oleh LSM yang menggunakan metode tersendiri guna mempertahankan sifat tradisional dari masyarakat SAD tersebut.

Untuk memudahkan melakukan analisis pada penelitian ini, maka dibuat skema pemikiran penelitian yang akan digambarkan pada halaman berikutnya.

Skema Pemikiran I



1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu sejarah, dengan pendekatan sosial-budaya, melalui empat tahapan yaitu pengumpulan sumber (heuristik) berupa studi dokumenter dan lapangan, pengujian (kritik), interpretasi dan penulisan (historiografi).⁴¹

⁴¹ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : Ui Press, 1986), hal. 33-34.

Tahapan pertama, dalam pengumpulan sumber dilakukan melalui proses pencarian dan pengumpulan sumber tertulis berupa arsip laporan “Pola Pembinaan Masyarakat Terasing SAD di Wilayah Kabupaten Batang Hari”, Laporan Data Base warga SAD di Kecamatan Bajubang, kemudian Laporan berita acara penyerahan sertifikat program KAT di Kabupaten Batang Hari, dan Daftar Laporan Jumlah Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga Masyarakat Terasing SAD yang telah dibina dan sedang dibina. Data tersebut diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari.

Pengumpulan sumber tertulis lainnya berupa data statistik jumlah masyarakat SAD yang dibina dan belum dibina oleh Pemerintah dari tahun 1980, 1984, 1991, 1994 dan 2010 yang di dapat dari kantor BPS Kabupaten Batang Hari. Sumber tertulis lain berupa catatan pendampingan dan bulletin milik lembaga non Pemerintahan yakni Warsi. Warsi ikut berpartisipasi mendampingi SAD di Kabupaten Batang Hari sejak tahun 1998. Catatan pendampingan Warsi merupakan sumber pokok yang sangat berharga di dalam penelitian ini, salah satu arsip tersebut berjudul: “Catatan Pendampingan KKI Warsi Tahun 2005” dan “Konsep Pengelolaan Terpadu Orang Rimba TNBD Tahun 2010”. Sedangkan bulletin yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah Bulletin Alam Sumatera yang diterbitkan secara berkala dari tahun 1998 hingga 2014, yang merupakan pendukung penting dalam penelitian ini. Catatan pendampingan dan bulletin tersebut diperoleh dari Kantor perwakilan Warsi yang berpusat di Kota Jambi. Untuk sumber yang diperoleh dari studi pustaka salah satunya adalah, *Jejak Peradaban Suku Anak Dalam Jambi:*

2012, yang menjelaskan partisipasi LSM Kopsad dalam membina SAD di Kabupaten Sarolangun dan Merangin, Studi pustaka diperoleh dari perpustakaan wilayah Propinsi Jambi.

Tahap berikutnya dalam penelitian ini berupa pengumpulan sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan pola tidak terstruktur dari menemui informan satu, bergulir ke informan lain yang menjadi tokoh kunci dan dapat dipercaya dalam memberikan informasi maupun keterangan terkait penelitian ini. Wawancara awal dilakukan dengan menemui salah seorang tokoh yang pernah bekerja di lingkungan Depsos Pusat RI yang bernama Yoyo Yudiwangsa, Syari A Roni, dan Zulkifli Somad. Untuk di lingkungan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Batang Hari dilakukan wawancara terhadap Kepala Seksi KAT bernama Yana. Sedangkan informasi penting di lingkungan SAD didapatkan dengan mewawancarai Kepala Desa Bungku yang bernama Utut Adianto Wahyu Hidayat, yang membuka jalan untuk mewawancarai Ketua Himpunan SAD kelompok Batin 9 yang bernama Abunyani, dari keterangan Abunyani diperoleh informasi lainnya terkait tokoh-tokoh SAD yang memiliki pengaruh besar dalam setiap kelompoknya. Informasi tersebut terus bergulir seperti bola salju, adapun tokoh SAD yang ditemui tersebut antara lain bernama Mustar, Kutar, Bayat dan Mulklad yang merupakan informan kunci terkait penelitian tesis ini. Wawancara juga dilakukan terhadap kelompok SAD TNBD yang dibina oleh Warsi, yaitu kelompok *Tumenggung Marituha* yang bernama Ndulang. Data dan informasi sumber lisan yang telah

diperoleh tersebut ada yang bersifat terbuka dan ada juga yang tertutup dengan pola tidak terstruktur, dengan menyesuaikan kondisi yang sedang terjadi di lapangan.

Tahap kedua, peneliti melakukan kritik sumber yang merupakan proses penyaringan data-data tertulis maupun lisan untuk dijadikan fakta-fakta sejarah dan diolah dan telah diuji validasi data tertulis dan lisan, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran sejarah. Kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik terhadap sumber intern dan eksteren. Kritik intern dan eksteren yang ditemukan di lapangan berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa perbedaan yang mencolok misalnya wawancara terhadap kelompok SAD Batin 9 dan Kelompok 113, kedua kelompok ini sangat berbeda dalam menjelaskan beberapa jawaban yang diajukan peneliti dengan pertanyaan yang serupa, maka dengan bijak peneliti menggunakan sumber yang dapat dipercaya yaitu dengan memilih kelompok SAD Batin 9 sebagai sampel penelitian.

Contoh perbedaan sederhananya adalah kelompok SAD Batin 9 mengakui proses pembinaan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah sejak tahun 1970an. Kelompok SAD 113 mengakui tidak pernah merasakan sentuhan pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah maupun LSM lainnya, sehingga perlu dilakukannya kritik sumber terhadap fakta di lapangan, kelompok SAD 113 tidak dijadikan sebagai sumber yang dapat dipercaya dikarenakan beberapa faktor yang datangnya dari dalam maupun luar. Kelompok SAD 113 merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh komunitas itu sendiri, fakta di lapangan ditemukan bahwa kelompok SAD 113 merupakan gabungan antara kelompok petani dan kelompok transmigran asal Jawa

yang mempunyai kepentingan sendiri dalam tuntutan mereka terhadap Pemerintah, namun dalam penelitian ini akan disinggung beberapa masalah yang dihadapi oleh SAD 113, yang merupakan salah satu rentetan bentuk perlawanan mereka terhadap kebijakan Pemerintah.

Beberapa faktor pendukung dalam proses penelitian ini adalah lokasi yang mudah dijangkau dengan kendaraan bermotor, pengalaman peneliti yang sempat tinggal di sekitar lokasi hunian SAD pada tahun 2003, keikutsertaan peneliti sebagai partisipan dan pendampingan SAD dalam menangani permasalahan sengketa tanah dengan pihak Perusahaan, dan pengalaman peneliti yang memiliki banyak kenalan di lokasi penelitian. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah kesibukan dari beberapa profesi kelompok SAD, kurangnya sinyal telepon genggam (HP) mempersulitkan komunikasi ketika ingin menjumpai kelompok SAD, karena di beberapa lokasi yang menjadi fokus penelitian tidak sepenuhnya tersentuh oleh fasilitas teknologi telekomunikasi.

Tahap ketiga, Interpretasi yang merupakan upaya peneliti untuk menjelaskan dan menghubungkan berbagai fakta sehingga mendapat suatu gambaran sejarah yang logis, dan sistematis dengan penjelasan kausalitas.

Tahap keempat, Historiografi merupakan tahap penyusunan fakta sejarah yang telah diperoleh untuk dijadikan sebuah rangkaian bermakna sehingga layak dijadikan ke dalam penulisan sejarah.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah rencana penelitian tesis ini, maka akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan, memberikan penjelasan secara garis besar tentang penulisan ini, terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan pendekatan, dan metode penelitian yang dipergunakan.

Bab II menjelaskan tentang ragam versi asal usul SAD yang berada di wilayah Kabupaten Batang Hari, berdasarkan sumber lisan maupun tulisan, menguraikan tentang Dasar Kebijakan Pemerintah untuk membina SAD.

Bab III membahas tentang program Pembinaan pada masa Orde Baru dan Otonomi Daerah. Cara, model dan sistematika pendekatan yang digunakan Pemerintah dan LSM dalam upaya membina SAD serta kendala-kendala selama dilakukannya kegiatan pembinaan.

Bab IV menjelaskan bagaimana respon dan dampak pembinaan bagi kehidupan SAD yang telah dibina secara garis besar. Bab V berisikan kesimpulan. Bab ini memberikan gambaran dari beberapa jawaban penelitian dan menjelaskan beberapa temuan di lapangan selama dilakukannya penelitian.